

Ringkasan Data Dan Informasi Kemiskinan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2022



Ringkasan Data Dan Informasi Kemiskinan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2022



RINGKASAN DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2022

ISSN: **2528-2271**

Nomor Publikasi: **53000.2309**

Katalog: **3205008.53**

Ukuran Buku: 17,5 x 25 cm

Jumlah Halaman: x + 43 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

Pengarah

Matamira Banggu Kale, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab

Indra Achmad Sofian Soury, SST, M.Si

Penyunting

Alberth Christian Lulan, SST, M.Si

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Esther Veronica Simanullang, SST, M.Si

<https://ntt.bps.go.id>

Kata Pengantar

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin diperlukan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT. Indikator-indikator tersebut antara lain jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya yang terbanding antarwaktu dan antarwilayah.

Publikasi “Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022” menyajikan indikator atau variabel yang terkait dengan isu kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi NTT. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 baik dari Susenas Kor maupun Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Data dan informasi kemiskinan yang tersaji dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam menyusun strategi dan mengupayakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga upaya yang telah dibangun bersama ini membawa manfaat untuk mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi NTT.

Kupang, Januari 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Matamira Banggu Kale

Daftar Isi

	Hal.
Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Bab 1 Pendahuluan.....	3
1.1 Latar belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang lingkup dan data yang digunakan.....	4
1.4 Sistematika penulisan.....	5
Bab 2 Kondisi Kemiskinan.....	7
2.1 Perkembangan tingkat kemiskinan Nusa Tenggara Timur.....	7
2.2 Kerentanan terhadap kemiskinan.....	16
2.3 Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.....	17
Bab 3 Ketimpangan Pengeluaran.....	21
3.1 <i>Gini ratio</i>	21
3.2 Indeks Theil dan Indeks L.....	23
3.3 Kriteria Bank Dunia.....	24
Daftar Pustaka.....	27
Lampiran.....	29

Daftar Tabel

	Hal.
Tabel 2.1	Garis kemiskinan menurut daerah dan komponennya, Maret 2021 – Maret 2022 (rp/kapita/bulan) 7
Tabel 2.2	Garis kemiskinan menurut kabupaten/kota, Maret 2021 – Maret 2022 (rp/kapita/bulan) 8
Tabel 2.3	Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, Maret 2021 – Maret 2022 9
Tabel 2.4	Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota, Maret 2021 – Maret 2022 10
Tabel 2.5	Garis kemiskinan menurut daerah, 2012-2022 (rp/kapita/bulan) 14
Tabel 2.6	Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, 2012-2022 15
Tabel 2.7	Persentase penduduk menurut daerah dan status kemiskinan, 2021 -2022 16
Tabel 3.1	Distribusi pengeluaran penduduk menurut daerah dan kriteria bank dunia, 2012-2022 25
Tabel 3.2	Persentase pembagian pengeluaran menurut kelas quintil dan daerah, 2021 -2022 26

Daftar Gambar

		Hal.
Gambar 2.1	Angka kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022	11
Gambar 2.2	Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2022	12
Gambar 2.3	Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten/kota, 2017 – 2022	13
Gambar 2.4	Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2022	18
Gambar 2.5	Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2022	19
Gambar 2.6	Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, September 2020 – Maret 2022	20
Gambar 3.1	<i>Gini ratio</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut daerah, Maret 2021 – Maret 2022	22
Gambar 3.2	Perkembangan <i>gini ratio</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2022	22
Gambar 3.3	Indeks Theil di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut daerah, Maret 2021 – Maret 2022	23
Gambar 3.4	Indeks L di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut daerah, Maret 2021 – Maret 2022	24
Gambar 3.5	Distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terendah menurut daerah, Maret 2021 – Maret 2022	24



BAB 1

Pendahuluan

<https://www.studypool.com>

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah serius hampir di setiap negara termasuk Indonesia. Isu tentang kemiskinan juga semakin menarik perhatian publik dan banyak pihak, terutama sejak dideklarasikan tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs) pada tahun 2000 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) pada tahun 2015.

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda SDGs di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Target yang ingin dicapai, pada tahun 2030 ini mensyaratkan setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.

Satu dasawarsa terakhir, pemikiran pembangunan secara konseptual telah mengalami perubahan paradigma yang lebih mendasar dari pola sentralistik ke pola desentralisasi dengan kebijakan otonomi daerah. Konsep otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan pemerintahan daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah masing-masing.

Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah memberikan implikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik untuk menurunkan kemiskinan di daerah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan lebih peka terhadap isu kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di daerahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian baru sejak tahun 2003, BPS dapat menyajikan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin setiap tahun.

BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Penduduk dikatakan miskin

apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Apalagi untuk ekonomi Provinsi NTT yang mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, yang tentu berdampak pada kesejahteraan penduduk baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Haughton & Khandker (2009), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin.
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat.
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin.
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan antarwilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

1.2 Tujuan

Publikasi “Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022” disusun dengan tujuan mendukung penyediaan data kemiskinan. Publikasi ini berupa penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, distribusi dan ketimpangan penduduk di Provinsi NTT.

Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dapat dipantau dari waktu ke waktu.

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut daerah perkotaan dan perdesaan kondisi Maret 2022. Selain itu, publikasi ini juga mengulas mengenai distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sumber data yang digunakan pada publikasi ini adalah data Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 12.630 rumah tangga.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bab 2 membahas mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Bab 3 membahas distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk pada tingkat provinsi maupun menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

<https://ntt.bps.go.id>

Kondisi Kemiskinan

2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi NTT

Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan

Tingkat kemiskinan selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan (kondisi Maret 2021 dan Maret 2022). Salah satu indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan meningkat pada periode Maret 2021-Maret 2022 dari Rp415.116,- menjadi Rp460.823,- perkapita per bulan atau sebesar 11,01 persen (Tabel 2.1). Keadaan serupa terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan, yaitu masing-masing meningkat sebesar 9,86 persen (dari Rp508.584,- menjadi Rp558.741,- perkapita per bulan) dan 11,17 persen (dari Rp385.970,- menjadi Rp429.079,- perkapita per bulan).

Tabel 2.1 Garis kemiskinan menurut daerah dan komponennya, Maret 2021–Maret 2022 (rp/kapita/bulan)

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan (GKM)	Non Makanan (GKNM)	Total (GK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2021	367 201	141 383	508 584
Maret 2022	402 228	156 513	558 741
Perdesaan			
Maret 2021	312 141	73 829	385 970
Maret 2022	344 813	84 266	429 079
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2021	324 545	90 571	415 116
Maret 2022	358 224	102 599	460 823

Sumber: Susenas 2021 - 2022 (kondisi Maret), diolah

Kota Kupang mempunyai garis kemiskinan tertinggi

Pada Maret 2022, Kupang masih menjadi kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp648.982,- dan Sumba Tengah merupakan kabupaten yang mempunyai garis kemiskinan yang terendah yaitu Rp341.513,-.

Tabel 2.2 Garis kemiskinan menurut kabupaten/kota, Maret 2021 – Maret 2022 (rp/kapita/bulan)

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	
	Maret 2021	Maret 2022
(1)	(2)	(3)
Sumba Barat	364 361	395 592
Sumba Timur	375 859	414 832
Kupang	386 577	425 750
Timor Tengah Selatan	344 239	382 167
Timor Tengah Utara	394 818	440 155
Belu	379 280	416 519
Alor	364 939	400 858
Lembata	421 901	464 542
Flores Timur	329 340	364 117
Sikka	354 234	389 455
Ende	428 328	473 403
Ngada	396 506	435 916
Manggarai	371 531	407 261
Rote Ndao	341 135	372 179
Manggarai Barat	370 943	405 746
Sumba Tengah	311 199	341 513
Sumba Barat Daya	390 217	432 375
Nagekeo	386 027	422 982
Manggarai Timur	373 972	411 670
Sabu Raijua	438 492	480 844
Malaka	378 824	419 292
Kota Kupang	599 880	648 982

Sumber: Susenas 2021 - 2022 (kondisi Maret), diolah

Jumlah penduduk miskin 2022 naik dibanding 2021

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Maret 2022 sebesar 1.131,62 ribu orang (20,05 persen), menurun dibanding Maret 2021 yang sebesar 1.169,31 ribu orang (20,99 persen). Selama periode Maret 2021-Maret 2022, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 8,04 ribu orang, sementara di daerah pedesaan berkurang 45,72 ribu orang (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, Maret 2021– Maret 2022

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (ratusribu)	Persentase penduduk miskin	Perubahan jumlah penduduk miskin (ribu) (2021-2022)	Perubahan persentase penduduk miskin (2021-2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2021	1,19	8,60	8,04	0,24
Maret 2022	1,27	8,84		
Perdesaan				
Maret 2021	10,51	25,08	-45,72	-1,22
Maret 2022	10,05	23,86		
Perkotaan + Perdesaan				
Maret 2021	11,69	20,99	-37,69	-0,94
Maret 2022	11,32	20,05		

Sumber: Susenas 2021 - 2022 (kondisi Maret), diolah

Disparitas tingkat kemiskinan antarkabupaten/kota cukup tinggi

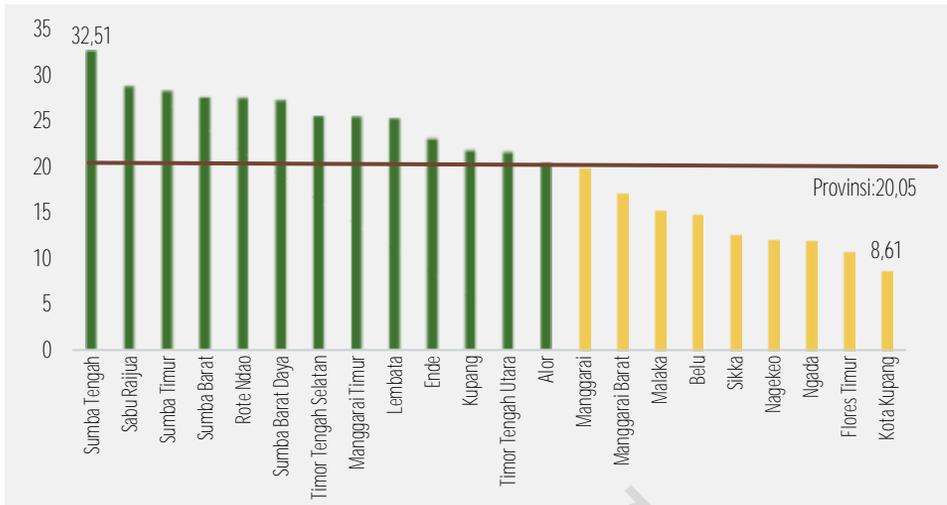
Permasalahan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bukan hanya pada jumlah atau persentasenya yang tinggi, tetapi juga pada disparitas antarwilayah yang sangat tinggi. Perbandingan antarkabupaten/ kota menunjukkan disparitas yang besar. Ketimpangan tersebut terjadi akibat tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, yaitu mencapai 32,51 persen dan rendahnya angka kemiskinan di Kota Kupang yaitu 8,61 persen pada tahun 2022 (Gambar 2.1).

Adanya variasi besar antardaerah menunjukkan bahwa tidak ada strategi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan kemiskinan mau tidak mau harus disesuaikan dengan tantangan spesifik di tiap daerah. Disparitas kemiskinan antardaerah bukan hanya terjadi dalam angka, tetapi juga dalam hal tantangan yang dihadapi. Daerah miskin pada umumnya juga merupakan daerah dengan tingkat pendidikan rendah, akses terhadap air bersih sulit, dan akses terhadap fasilitas kesehatan rendah. Masalah-masalah kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga lebih banyak terdapat di daerah miskin.

Tabel 2.4 Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota, Maret 2021– Maret 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2021	Maret 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumba Barat	37,78	37,06	28,39	27,47
Sumba Timur	78,33	75,28	29,68	28,22
Kupang	91,25	88,02	22,98	21,70
Timor Tengah Selatan	125,68	120,45	26,64	25,45
Timor Tengah Utara	58,33	55,88	22,62	21,50
Belu	35,41	33,98	15,68	14,84
Alor	43,83	42,30	21,09	20,25
Lembata	38,75	37,88	26,21	25,18
Flores Timur	28,90	28,08	11,14	10,75
Sikka	43,09	40,87	13,35	12,61
Ende	66,38	63,40	24,13	23,00
Ngada	20,98	20,14	12,58	11,93
Manggarai	71,03	69,68	20,48	19,84
Rote Ndao	51,71	52,43	28,08	27,45
Manggarai Barat	51,15	49,95	17,92	17,15
Sumba Tengah	25,48	24,49	34,27	32,51
Sumba Barat Daya	100,42	98,50	28,18	27,16
Nagekeo	19,11	18,01	12,91	12,05
Manggarai Timur	77,17	74,55	26,50	25,35
Sabu Raijua	30,60	30,00	30,13	28,73
Malaka	32,17	30,48	16,33	15,26
Kota Kupang	41,77	40,20	9,17	8,61

Sumber: Susenas 2021 - 2022 (kondisi Maret), diolah



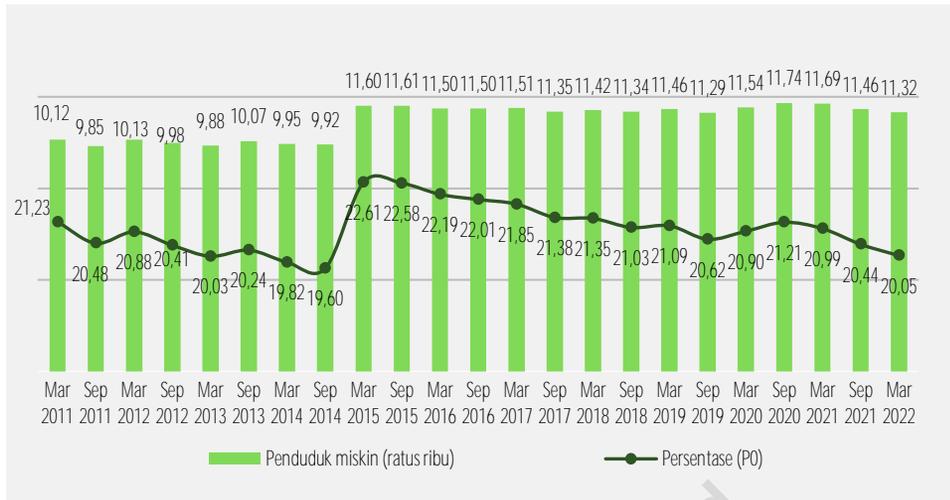
Gambar 2.1 Angka kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

Sumber: Susenas 2022 (kondisi Maret), diolah

Perkembangan tingkat kemiskinan periode Maret 2012-Maret 2022

Secara umum, pada periode Maret 2012–2022, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Kenaikan tingkat kemiskinan yang paling besar terjadi pada Maret 2015 yaitu meningkat sebesar 3,01 persen poin (167,96 ribu orang) terhadap September 2014. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah kenaikan yang sangat tinggi pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT selanjutnya perlahan bergerak turun. Akan tetapi, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat kemiskinan kembali naik yaitu menjadi 20,90 persen (1.153,76 ribu orang) pada Maret 2020 dan menjadi 21,21 persen (1.173,53 ribu orang) pada September 2020.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT terlihat terus menurun seiring perekonomian yang perlahan mulai meningkat yaitu menjadi 20,05 persen (1.131,62 ribu orang) pada Maret 2022. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan Maret 2022 pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.6.



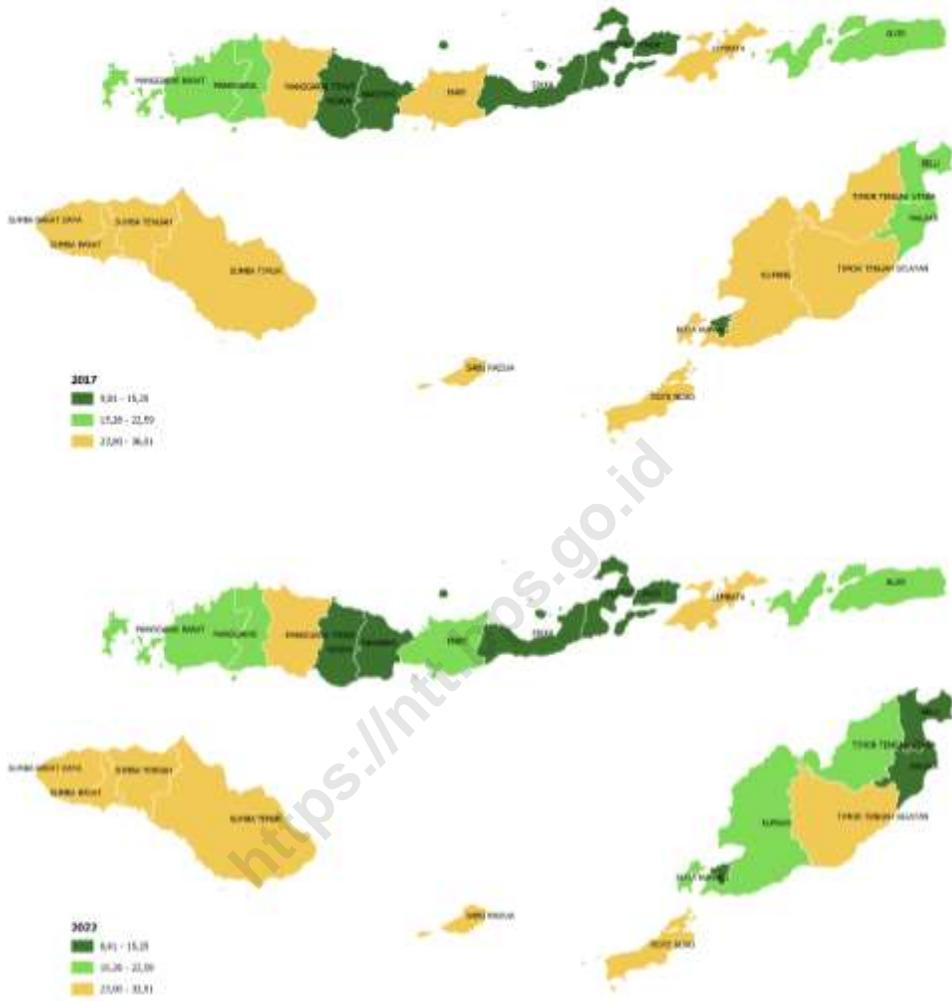
Gambar 2.2 Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maret 2012 – Maret 2022

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Catatan: Maret 2012 – September 2013 merupakan *backcasting* dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010

Meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, perlu diperhatikan adanya indikasi kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang dialami oleh sekitar 1,1 juta penduduk di Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah orang-orang yang termarginalkan dalam kehidupan sosialnya, berpendidikan rendah, dan tidak memiliki keahlian, tidak memiliki akses terhadap faktor produksi, serta petani gurem atau buruh tani di perdesaan. Tidak sedikit di antara mereka terkategori sangat miskin dengan pengeluaran per kapita sangat jauh dari GK sehingga program pengentasan kemiskinan berlapis seperti bantuan sosial tunai (BST), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, program keluarga harapan (PKH), dan kredit usaha rakyat (KUR) pun akan sulit mengeluarkan mereka dari jerat kemiskinan.

Selain itu, program-program bantuan perlindungan sosial seperti bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa untuk penduduk miskin, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan jaminan persalinan (Jampersal) juga telah diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk miskin, terutama penduduk miskin kronik. Namun, diduga efektivitas program-program tersebut masih rendah disebabkan penduduk miskin kronis tidak tersentuh atau tidak memiliki akses terhadap program bantuan-bantuan tersebut. Hal ini dapat disebabkan lokasi tempat tinggal penduduk miskin kronis yang terpencil dan jauh di pelosok sehingga sulit dijangkau.



Gambar 2.3 Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten/kota, 2017 – 2022

Sumber: Susenas 2017-2022 (kondisi Maret), diolah

Apabila dilihat lebih rinci menurut kabupaten/kota, ternyata ada satu kabupaten yang tidak mengalami perubahan tingkat kemiskinan selama periode 2017-2022 yaitu Flores Timur (Lampiran 3). Sementara itu, kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan kemiskinan bervariasi yaitu antara 0,84 persen sampai dengan 3,99 persen. Pengurangan kemiskinan yang paling besar selama periode 2017-2022 terjadi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu dari sebesar 29,44 persen menjadi 25,45 persen, sedangkan Ngada merupakan kabupaten dengan persentase pengurangan kemiskinan terkecil yaitu dari 12,77 persen menjadi 11,93 persen. Gambaran secara spasial dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur adalah fenomena perdesaan

Tabel 2.5 Garis kemiskinan menurut daerah, 2012 - 2022 (rp/kapita/bulan)

Periode	Garis Kemiskinan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mar 2012	282 281	194 722	211 786
Sep 2012	293 906	205 083	222 507
Mar 2013	308 059	217 918	235 805
Sep 2013	321 163	234 141	251 080
Mar 2014	337 367	248 606	265 955
Sep 2014	340 459	251 040	268 536
Mar 2015	364 920	281 022	297 864
Sep 2015	374 355	290 363	307 224
Mar 2016	386 139	306 721	322 947
Sep 2016	389 661	310 296	327 003
Mar 2017	406 973	326 320	343 396
Sep 2017	409 382	329 136	346 737
Mar 2018	418 525	336 584	354 898
Sep 2018	421 855	342 303	360 069
Mar 2019	441 625	353 684	373 922
Sep 2019	467 314	359 011	383 762
Mar 2020	494 388	376 212	403 005
Sep 2020	496 191	377 246	404 712
Mar 2021	508 584	385 970	415 116
Sep 2021	531 194	408 769	437 606
Mar 2022	558 741	429 079	460 823

Sumber: Susenas 2012-2022, diolah

Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, seperti kebanyakan provinsi lainnya di Indonesia adalah fenomena perdesaan. Meskipun garis kemiskinan di perdesaan selalu lebih rendah (Tabel 2.5), namun proporsi penduduk miskin yang tinggal di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan (Tabel 2.6). Selain itu, penurunan persentase kemiskinan di perdesaan jauh lebih lambat dibanding di perkotaan. Di perkotaan, selama periode Maret 2012 – Maret 2022, persentase penduduk miskin tercatat mengalami penurunan sebesar 3,38 persen poin, sedangkan di perdesaan, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen poin.

Tabel 2.6 Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, 2012-2022

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (ratus ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2012	1,15	8,97	10,13	12,22	22,98	20,88
Sep 2012	1,17	8,81	9,98	12,21	22,41	20,41
Mar 2013	1,13	8,75	9,88	11,54	22,13	20,03
Sep 2013	0,98	9,09	10,07	10,10	22,69	20,24
Mar 2014	1,00	8,94	9,95	10,23	22,15	19,82
Sep 2014	1,06	8,86	9,92	10,68	21,78	19,60
Mar 2015	1,16	10,44	11,60	11,28	25,46	22,61
Sep 2015	0,97	10,63	11,61	9,41	25,89	22,58
Mar 2016	1,12	10,38	11,50	10,58	25,17	22,19
Sep 2016	1,12	10,38	11,50	10,17	25,19	22,01
Mar 2017	1,17	10,33	11,51	10,32	25,03	21,85
Sep 2017	1,19	10,16	11,35	10,11	24,59	21,38
Mar 2018	1,22	10,20	11,42	9,94	24,74	21,35
Sep 2018	1,14	10,20	11,34	9,09	24,65	21,03
Mar 2019	1,14	10,32	11,46	8,84	24,91	21,09
Sep 2019	1,09	10,21	11,29	8,34	24,45	20,62
Mar 2020	1,13	10,40	11,54	8,64	24,73	20,90
Sep 2020	1,19	10,55	11,74	8,76	25,26	21,21
Mar 2021	1,19	10,51	11,69	8,60	25,08	20,99
Sep 2021	1,21	10,26	11,46	8,57	24,42	20,44
Mar 2022	1,27	10,05	11,32	8,84	23,86	20,05

Keterangan: K = perkotaan, D = perdesaan, K+D = perkotaan + perdesaan

Sumber: Susenas 2012-2022, diolah

Kegiatan perekonomian di perdesaan biasanya didominasi oleh sektor pertanian, maka kemiskinan juga sekaligus merupakan fenomena pertanian. Berdasarkan data Susenas 2006 yang diambil dari studi Bank Dunia (2006), dari setiap seratus orang Indonesia, 44 menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun, dari setiap seratus penduduk miskin, 64 hidup dari sektor ini. Artinya, proporsi penduduk miskin Indonesia yang penghasilan utamanya ada di sektor pertanian lebih tinggi dari rata-rata orang Indonesia.

2.2 Kerentanan terhadap kemiskinan

Selain kemiskinan, Nusa Tenggara Timur juga mengalami masalah kerentanan. Masalah yang dimaksud adalah masih banyaknya jumlah penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (GK) yang sewaktu-waktu dapat dengan mudah jatuh ke dalam kemiskinan. Penduduk yang biasanya dikelompokkan sebagai penduduk hampir miskin tersebut, persentasenya mengalami penurunan dari 9,71 persen pada Maret 2021 menjadi 7,39 persen pada Maret 2022 (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Persentase penduduk menurut daerah dan status kemiskinan, 2020-2021

Daerah/ Periode	SM	M	HM	RML	TM	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Maret 2021	2,69	5,91	8,21	18,59	64,60	100,00
Maret 2022	3,89	4,95	8,92	24,11	58,13	100,00
Perdesaan						
Maret 2021	10,62	14,46	10,20	18,49	46,23	100,00
Maret 2022	8,84	15,02	6,87	28,64	40,63	100,00
Perkotaan + Perdesaan						
Maret 2021	8,65	12,34	9,71	18,52	50,78	100,00
Maret 2022	7,59	12,46	7,39	27,49	45,07	100,00

Keterangan:

- SM : sangat miskin (pendapatan per kapita/bulan \leq 0,8 GK)
- M : miskin (0,8 GK < pendapatan per kapita/bulan \leq GK)
- HM : hampir miskin (GK < pendapatan per kapita/bulan \leq 1,2 GK)
- RML : rentan miskin lainnya (1,2 GK < pendapatan per kapita/bulan \leq 1,6 GK)
- TM : tidak miskin (pendapatan per kapita/bulan > 1,6 GK)

Sumber: Susenas 2021-2022 (kondisi Maret), diolah

Alatas & Jellema (2012) memandang kelompok rentan bukan hanya penduduk yang hampir miskin saat ini dan berpeluang besar menjadi miskin di periode mendatang, namun penduduk yang saat ini miskin juga dianggap memiliki peluang yang sama untuk kembali miskin di periode mendatang. Oleh karena itu, mereka berpendapat jika pada Maret 2021 ada sekitar 20,99 persen penduduk dikatakan miskin karena konsumsi per kapitanya di bawah GK, maka ada sekitar 30,70 persen penduduk yang dikatakan miskin karena konsumsinya berada di bawah 1,2GK dan sekitar 49,22 persen penduduk yang dikatakan miskin karena konsumsinya berada di bawah 1,6GK. Kelompok terakhir itulah yang didekati sebagai kelompok rentan miskin. Penduduk hampir miskin mengalami kondisi pendapatan yang tidak aman (*income security*), sehingga *shock* kecil saja dapat dengan mudah membawa mereka jatuh ke dalam kemiskinan (Alatas & Jellema, 2012).

Upaya yang telah dikembangkan pemerintah melalui sistem perlindungan sosial adalah untuk membantu tidak hanya kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat

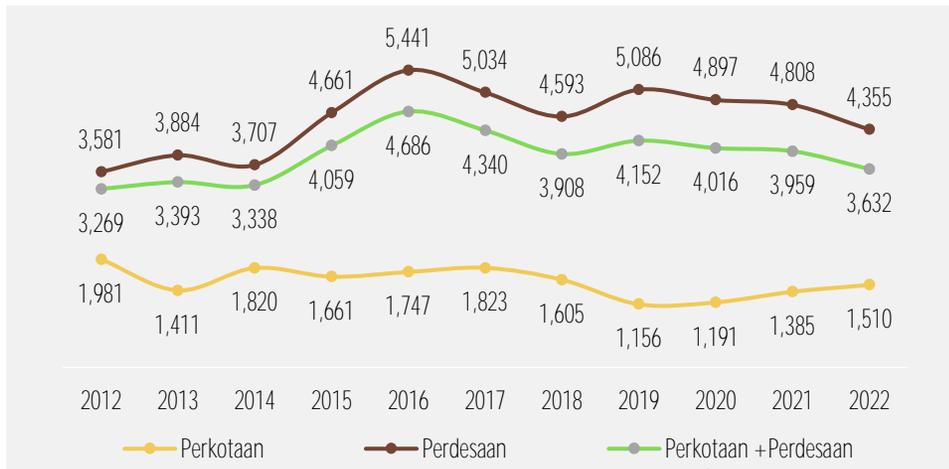
menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, maupun ditimpa bencana. Sistem perlindungan sosial yang efektif diharapkan dapat mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin (TNP2K, 2010). Hal tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya menangani masalah kerentanan adalah bagaimana mencegah rumah tangga miskin tidak kembali miskin dan mencegah rumah tangga rentan agar tidak jatuh miskin.

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa banyak penduduk yang berada di atas GK, tetapi rentan untuk menjadi miskin apabila terjadi suatu gejolak ekonomi yang besar, seperti pada tahun 1998 dan tahun 2005. Jika ditarik garis kemiskinan menjadi 1,2 GK, maka penduduk yang miskin pada Maret 2022 menjadi 27,44 persen dan apabila ditambah menjadi 1,6 GK, maka jumlah penduduk yang miskin menjadi 54,93 persen. Penduduk seperti inilah yang dapat dibantu oleh pemerintah agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara orang miskin dan yang hampir miskin sangat kecil menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada perbaikan kesejahteraan mereka yang masuk dalam dua kelompok kuintil berpenghasilan paling rendah (Bank Dunia, 2006).

2.3 Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan

Selain masalah kerentanan kemiskinan, dinamika kemiskinan juga berkaitan dengan perubahan komposisi rumah tangga miskin pada suatu titik waktu. Seberapa jauh kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin akibat perubahan komposisi tersebut, menjadi hal yang tidak dapat ditangkap hanya dari *head count index* (P_0) atau proporsi penduduk miskin. Namun, Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran untuk mengukur tingkat kemiskinan selain P_0 yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2).

Indeks kedalaman kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P_1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Sementara itu indeks keparahan kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P_2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Besarnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan antara 2012-2022 disajikan pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5.

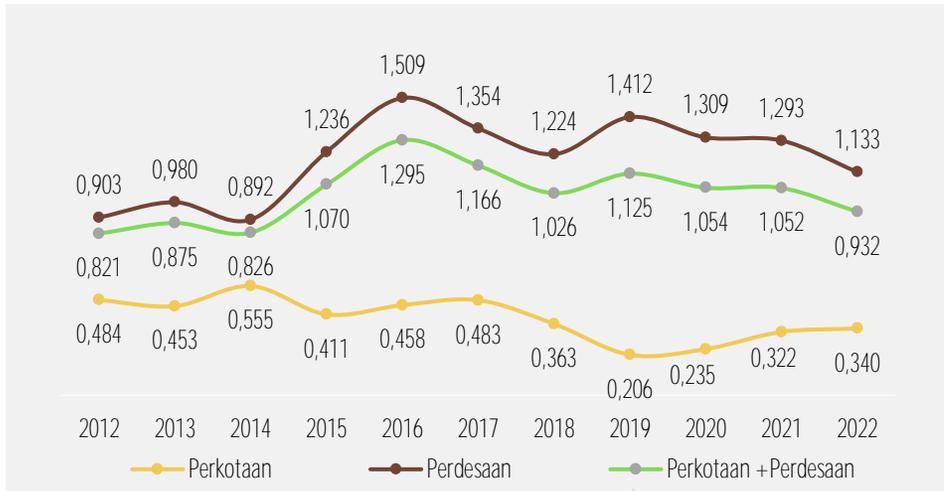


Gambar 2.4 Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2022

Sumber: Susenas 2012-2022 (kondisi Maret), diolah

Nilai P_1 dan P_2 di daerah perdesaan terlihat lebih tinggi dibandingkan nilainya di daerah perkotaan. Hal ini memperkuat penjelasan sebelum ini bahwa kemiskinan adalah fenomena perdesaan. Bukan hanya jumlah dan tingkat kemiskinan, intensitas kemiskinan di perdesaan juga masih lebih buruk dibandingkan perkotaan. Di sisi lain, nilai P_1 dan P_2 menunjukkan adanya penurunan sejak tahun 2012. Penurunan kedua nilai indeks ini, bersama-sama dengan penurunan angka kemiskinan (*headcount ratio*) mengindikasikan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2022 terjadi perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin dan sekaligus perbaikan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menurut daerah tempat tinggal, dalam periode 2012-2022 indeks kedalaman kemiskinan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, sedangkan di perkotaan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan perdesaan secara umum lebih besar dari indeks kedalaman kemiskinan perkotaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin perkotaan dengan garis kemiskinan perkotaan relatif lebih dekat apabila dibandingkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin perdesaan dengan garis kemiskinan perdesaan.



Gambar 2.5 Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2022

Sumber: Susenas 2012-2022 (kondisi Maret), diolah

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan periode 2012-2022 cenderung terlihat berfluktuasi. Jika ditinjau menurut daerah, di perdesaan terlihat lebih berfluktuasi mengikuti pola indeks keparahan kemiskinan secara umum. Sementara itu, di perkotaan cenderung mengalami penurunan.

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa nilai P_1 pada Maret 2022 (sebesar 3,632) mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021 (sebesar 3,959). Penurunan indeks tersebut berbeda dengan tren Maret-September 2021 yang menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini berarti terjadi perubahan komposisi penduduk miskin yang menyebabkan terjadinya dinamika kemiskinan. Dinamika kemiskinan dilihat juga dari nilai P_2 yang menunjukkan perubahan pola pada dua periode terakhir yaitu Maret-September 2021 mengalami peningkatan, sedangkan periode Maret 2021-Maret 2022 menunjukkan penurunan.



Gambar 2.6 Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, September 2020- Maret 2022

Sumber: Susenas 2020-2022, diolah

Diperlukan penguatan berbagai upaya yang telah berjalan selama ini, dan lebih dari itu diperlukan upaya khusus untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Oleh karena itu, secara progresif pemerintah daerah sangat perlu mengoptimalkan dan mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan sistem pemantauan terpadu terhadap berbagai program tersebut dengan target pencapaian *output* yang terukur dan tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran dalam implementasi program.

Ketimpangan Pengeluaran

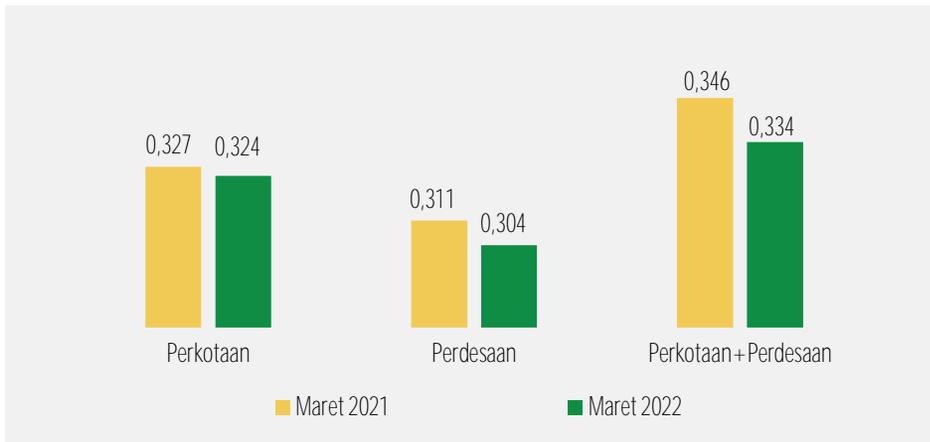
Selain kemiskinan dan kerentanan, dikenal juga istilah “ketimpangan”. Ketimpangan merupakan salah satu konsep lain dari kesejahteraan yang lebih luas dari konsep kemiskinan, dalam arti bahwa ketimpangan didefinisikan terhadap seluruh populasi, dan tidak hanya pada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

Cara paling sederhana mengukur ketimpangan dimulai dengan membagi penduduk menjadi lima bagian, yaitu dari kelompok termiskin hingga kelompok terkaya, dan menghitung tingkat atau proporsi pendapatan/ pengeluaran yang diterima oleh setiap kelompok. Semakin besar perbedaan pendapatan yang diterima masing-masing kelompok, menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*), Indeks Theil, Indeks-L, dan Ukuran Bank Dunia.

3.1 *Gini ratio*

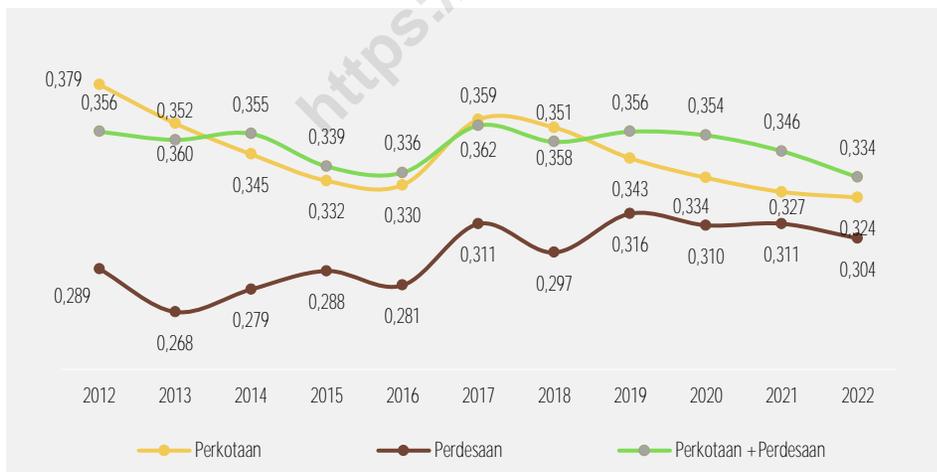
Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, angka *gini ratio* turun sebesar 0,012

Gini ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan *gini ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode Maret 2021 dan Maret 2022, *gini ratio* mengalami penurunan dari 0,346 menjadi 0,334 (Gambar 3.1). Pola yang sama juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.



Gambar 3.1 *Gini ratio* di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut daerah, Maret 2021 - Maret 2022
 Sumber: Susenas 2021-2022 (kondisi Maret), diolah

Secara umum, perkembangan *gini ratio* selama periode 2012-2022 terlihat berfluktuasi (Gambar 3.2). *Gini ratio* mengalami peningkatan tertinggi pada 2017 yaitu sebesar 0,023 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk. Pola yang sama juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

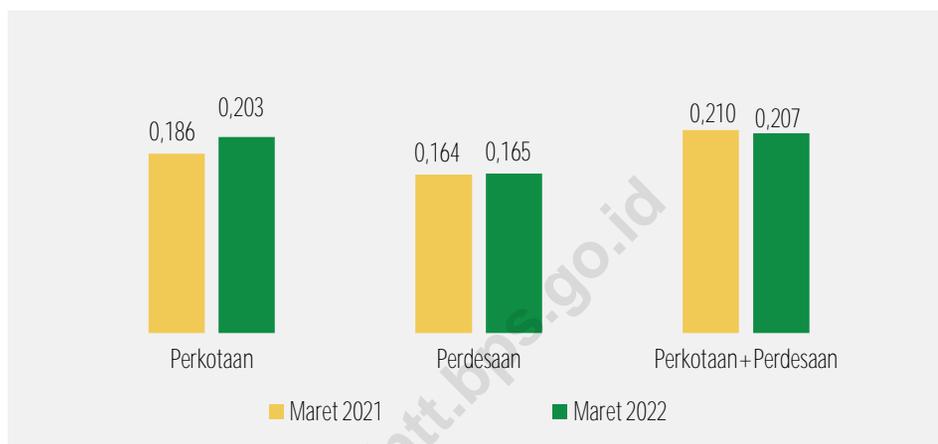


Gambar 3.2 Perkembangan *gini ratio* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2022
 Sumber: Susenas 2012-2022 (kondisi Maret), diolah

3.2 Indeks Theil dan Indeks L

Secara umum, selama periode Maret 2021-Maret 2022, indeks theil menurun

Selain *gini ratio* dikenal juga indeks theil yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran pada kelompok atas (kaya). Selama setahun terakhir (Maret 2021-Maret 2022), indeks theil turun dari 0,210 menjadi 0,207 (Gambar 3.3). Jika dilihat menurut wilayah, pola yang terlihat sebaliknya yaitu baik di daerah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan indeks theil yang meningkat.



Gambar 3.3 Indeks Theil di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut daerah, Maret 2021-Maret 2022
Sumber: Susenas 2021-2022 (kondisi Maret), diolah

Secara umum, selama periode Maret 2021-Maret 2022, angka indeks L menurun



Gambar 3.4 Indeks L di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut daerah, Maret 2021-Maret 2022
Sumber: Susenas 2021-2022 (kondisi Maret), diolah

Indikator ketimpangan pengeluaran lainnya adalah indeks-L. Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah.

Selama setahun terakhir (kondisi Maret 2021 – Maret 2022), indeks-L turun dari 0,195 menjadi 0,180 (Gambar 3.4). Pola yang sama terlihat di perdesaan maupun di perkotaan.

3.3 Kriteria Bank Dunia

Selama periode 2021-2022, tingkat ketimpangan berada pada level rendah



Gambar 3.5 Distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terendah menurut daerah, Maret 2021-Maret 2022

Sumber: Susenas 2021-2022 (kondisi Maret), diolah

Gambar 3.5 menunjukkan secara keseluruhan pada tahun 2021-2022, porsi pengeluaran oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka menurut kriteria bank dunia tergolong ketimpangan rendah (*low inequality*). Pola yang serupa terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Selama periode 2012-2022, tingkat ketimpangan berada pada level rendah

Bila dilihat perkembangannya, ketimpangan di perkotaan maupun perdesaan pada periode 2012-2022 dikategorikan berada pada ketimpangan rendah (*low inequality*). Jika dibandingkan menurut wilayah, pada periode 2012-2022, perkotaan memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Distribusi pengeluaran penduduk menurut daerah dan kriteria bank dunia, 2012-2022

Daerah/ Kelompok Penduduk	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perkotaan											
40 % Terendah	18,16	18,98	18,94	20,04	19,81	18,50	18,54	19,50	19,72	20,14	21,29
40 % Menengah	36,35	36,64	38,97	38,74	39,46	37,84	38,21	38,02	38,89	39,06	36,58
20 % Teratas	45,48	44,38	42,09	41,23	40,74	43,66	43,25	42,48	41,39	40,80	42,14
Perdesaan											
40 % Terendah	22,91	24,07	23,92	23,12	19,73	21,25	21,88	20,79	21,19	20,58	22,16
40 % Menengah	38,19	38,55	37,57	37,94	37,06	38,92	39,40	39,17	39,11	40,31	37,66
20 % Teratas	38,91	37,38	38,51	38,93	43,21	39,84	38,72	40,04	39,70	39,11	40,18
Perkotaan + Perdesaan											
40 % Terendah	19,86	20,31	20,14	19,81	20,51	19,01	19,41	18,91	18,99	18,94	20,56
40 % Menengah	35,55	35,19	34,75	39,46	36,88	37,18	37,26	37,76	37,77	38,96	37,26
20 % Teratas	44,59	44,50	45,10	40,74	42,61	43,81	43,33	43,33	43,24	42,10	42,18

Sumber: Susenas 2012-2022 (kondisi Maret), diolah

Secara umum, selama periode 2021-2022, rasio (Q_5/Q_1) Menurun

Indikator rasio pengeluaran kelompok 20 persen teratas (Q_5) dengan 20 persen terendah (Q_1) juga dapat digunakan untuk melihat distribusi pengeluaran antarkelompok penduduk secara umum. Semakin besar rasio (Q_5/Q_1), ketimpangan pendapatan/pengeluaran semakin tinggi. Pada periode 2021-2022, secara umum rasio (Q_5/Q_1) di perkotaan maupun perdesaan menurun. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di perkotaan dan perdesaan semakin rendah (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Persentase pembagian pengeluaran menurut kelas quintil dan daerah, 2021-2022

Quintil	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Q ₁	8,18	8,92	8,48	8,97	7,51	8,16
Q ₂	11,96	12,36	12,10	13,19	11,44	12,41
Q ₃	16,21	15,92	16,63	16,24	16,10	15,68
Q ₄	22,85	20,66	23,68	21,42	22,86	21,57
Q ₅	40,80	42,14	39,11	40,18	42,10	42,18
Rasio Q ₅ /Q ₁	4,99	4,72	4,61	4,48	5,61	5,17

Sumber: Susenas 2021-2022 (kondisi Maret), diolah

<https://ntt.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Alatas, V. & Jellema, J. (2012). *Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia*. The World Bank.
- Bank Dunia. (2006). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan Indonesia.
- BPS. & World Bank. (2002). *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan. Terjemahan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Haughton & Khandker. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC. Halaman 181.
- Suyanto, Bagong. (1995). *Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya*. Surabaya : Airlangga University Press.
- TNP2K. (2010). *Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan*. Jakarta.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 9*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

LAMPIRAN

<https://nrt.bps.go.id>

Lampiran 1. Daftar komoditi kebutuhan dasar makanan, Maret 2022

Jenis Komoditi	Satuan	Nilai (rp/kap/bln)		Kandungan kalori	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beras	Kg	96 454	106 016	944,62	1 005,41
Beras ketan	Kg	63	331	0,27	2,54
Jagung pipilan/ beras jagung	Kg	2 955	7 576	31,71	110,72
Tepung terigu	Kg	967	617	8,94	6,53
Ketela pohon/singkong	Kg	4 065	3 925	24,29	34,13
Ketela rambat/ubi	Kg	533	587	2,35	3,61
Gaplek	Kg	0	88	0,00	1,78
Tongkol/tuna/ cakalang	Kg	9 731	4 822	13,14	6,59
Kembung	Kg	7 391	1 597	6,66	1,78
Teri	Kg	341	382	0,31	0,34
Bandeng	Kg	140	158	0,15	0,26
Mujair	Kg	119	585	0,11	0,32
Daging sapi	Kg	1 631	2 267	1,04	1,60
Daging babi	Kg	1 820	3 341	2,59	6,01
Daging ayam ras	Kg	5 457	3 476	11,05	7,41
Daging ayam kampung	Kg	3 717	5 560	5,06	8,41
Tetelan	Kg	0	0	0,00	0,00
Telur ayam ras	Butir	8 989	4 878	9,57	5,25
Telur itik/telur itik manilla	Butir	43	9	0,04	0,01
Susu kental manis	397 Gr	883	802	2,86	2,72
Susu bubuk	Kg	3 036	1 984	5,20	3,44
Bayam	Kg	3 073	1 849	1,00	0,86
Buncis	Kg	831	250	0,56	0,16
Kacang panjang	Kg	673	1 027	0,56	0,75
Tomat	Kg	2 555	1 003	0,98	0,41
Daun ketela pohon	Kg	5 020	7 285	13,72	23,43
Nangka muda	Kg	170	200	0,38	0,48
Bawang merah	Ons	4 957	4 382	1,63	1,53
Cabe merah	Kg	984	527	0,18	0,10
Cabe rawit	Kg	3 251	3 390	1,79	1,82

Sumber: Susenas 2022 (kondisi Maret), diolah

Lampiran 1. (Lanjutan)

Jenis Komoditi	Satuan	Nilai (rp/kap/bln)		Kandungan kalori	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kacang tanah tanpa kulit	Kg	766	1 253	4,27	7,09
Tahu	Kg	3 652	1 922	8,90	4,14
Tempe	Kg	3 798	1 914	13,82	5,75
Mangga	Kg	14	20	0,01	0,02
Salak	Kg	35	55	0,05	0,11
Pisang	Kg	345	1 456	0,49	3,13
Pepaya	Kg	1 726	1 770	1,85	2,55
Minyak kelapa	Liter	439	419	4,90	5,18
Kelapa	Butir	549	991	5,30	14,77
Gula pasir	Ons	7 055	8 796	46,70	60,21
Gula merah	Ons	4	304	0,01	1,02
Teh bubuk & teh celup (sachet)	Ons & 2 Gr	2 030	1 415	0,64	0,56
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	Ons & 20 Gr	6 363	8 353	14,60	23,98
Garam	Gram	1 391	1 699	0,00	0,00
Kemiri	Gram	73	35	0,28	0,21
Terasi/petis	Gram	125	46	0,14	0,06
Kerupuk mentah	Ons	476	85	2,49	0,47
Mie instan	80gr	6 821	4 604	22,65	19,00
Roti	Potong	6 258	5 884	23,43	21,36
Kue kering/biskuit	Ons	2 886	2 462	13,68	13,61
Kue basah	Buah	7 659	2 162	25,63	7,20
Rokok kretek filter	Batang	22 971	20 045	0,00	0,00
Jumlah	-	245 283	234 604	1 280,60	1 428,80
Setara 2.100 kkalori	-	402 228	344 813	192	164

Sumber: Susenas 2022 (kondisi Maret), diolah

Lampiran 2. Daftar komoditi kebutuhan dasar bukan makanan, Maret 2022

Jenis Komoditi	Nilai (rp/kap/bln)	
	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)
Perumahan	63 401	37 440
Listrik	9 908	3 662
Air	5 634	906
Minyak tanah	4 701	645
Kayu bakar	6 463	6 432
Obat nyamuk, korek api, baterai, aki, dsb	1 155	677
Pos dan benda pos	3	9
Perlengkapan mandi	9 359	4 129
Barang kecantikan	2 432	1 060
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	3 861	1 974
Sabun cuci	2 290	2 280
Pendidikan	15 690	5 492
Kesehatan	2 936	1 331
Bahan pemeliharaan pakaian	1 202	492
Pemeliharaan kesehatan	63	23
Bensin	9 502	6 060
Angkutan	5 284	1 980
KTP, SIM, akte kelahiran, foto copy, photo, dsb	108	41
Pakaian jadi laki-laki dewasa	1 682	1 292
Pakaian jadi perempuan dewasa	1 903	1 581
Pakaian jadi anak-anak	2 464	1 590
Keperluan menjahit	85	65
Alas kaki	1 401	1 367
Tutup kepala	156	114
Handuk, ikat pinggang, dsb	218	208
Perlengkapan perabot rumah tangga	137	265
Perkakas rumah tangga	204	220
Alat-alat dapur/makan	255	566
Arloji/jam, kamera, dll	1	1
Tas, koper, dsb	76	91
Mainan anak dan perbaikannya	146	71
Pajak Bumi dan Bangunan	627	405
Pajak kendaraan bermotor	2 607	912
Pungutan/retribusi	183	354
Perayaan hari raya agama	64	18
Upacara agama atau adat lainnya	314	516
Jumlah	156 513	84 266

Sumber: Susenas 2022 (kondisi Maret), diolah

Lampiran 3. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota, 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumba Barat	29,28	28,51	28,29	28,17	28,39	27,47
Sumba Timur	31,03	30,13	30,02	29,65	29,68	28,22
Kupang	22,91	23,10	23,03	22,77	22,98	21,70
Timor Tengah Selatan	29,44	28,06	27,87	27,49	26,64	25,45
Timor Tengah Utara	23,52	22,31	22,45	22,28	22,62	21,50
Belu	15,95	15,70	15,54	15,37	15,68	14,84
Alor	21,67	21,63	21,59	21,09	21,09	20,25
Lembata	26,48	26,45	26,30	26,14	26,21	25,18
Flores Timur	10,75	11,05	10,90	10,84	11,14	10,75
Sikka	14,20	13,82	13,53	13,12	13,35	12,61
Ende	23,95	24,20	23,18	23,76	24,13	23,00
Ngada	12,77	12,94	12,48	12,51	12,58	11,93
Manggarai	21,91	20,83	20,55	20,34	20,48	19,84
Rote Ndao	28,81	28,08	27,95	27,54	28,08	27,45
Manggarai Barat	18,86	18,14	18,01	17,71	17,92	17,15
Sumba Tengah	36,01	34,85	34,62	34,49	34,27	32,51
Sumba Barat Daya	30,13	28,88	28,06	28,00	28,18	27,16
Nagekeo	13,48	12,98	12,85	12,61	12,91	12,05
Manggarai Timur	26,80	26,50	26,49	26,52	26,50	25,35
Sabu Raijua	31,07	30,83	30,52	30,18	30,13	28,73
Malaka	16,52	16,34	16,12	16,04	16,33	15,26
Kota Kupang	9,81	9,61	9,22	8,96	9,17	8,61

Sumber: Susenas 2017-2022 (kondisi Maret), diolah

Lampiran 4. Catatan Teknis

1. Literatur Kemiskinan

1.1 Secara asal penyebab, kemiskinan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.

Kemiskinan struktural, kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan **perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin"**.

1.2 Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut

Perbedaan keduanya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sementara itu, standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu **tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin"**, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk.

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum.

1.3 Terminologi kemiskinan lainnya

- Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

- Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinandeterminan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.
- Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai, “*poverty is pronounced deprivation in well-being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.
- United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan.
- Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

2. Metode Penghitungan Kemiskinan

2.1 Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2 Sumber data

Sumber data utama yang dipakai adalah data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) modul konsumsi dan kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dengan jumlah sampel 11.740 rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil survei paket komoditi kebutuhan dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. Untuk penimbang data Susenas (*weight*) yang digunakan mulai tahun 2011 merupakan *backcasting* dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010.

2.3 Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM), sebagai berikut.

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

2.4 Teknik penghitungan garis kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara adalah garis kemiskinan periode sebelumnya yang di *inflate* dengan inflasi umum indeks harga konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan.

IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah.

$$GKM_{ji} = \sum_{k=1}^{52} P_{jki} Q_{jki} = \sum_{k=1}^{52} V_{jki}$$

GKM_{ji} = garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) kabupaten/kota i

P_{jki} = harga komoditi k di daerah j dan kabupaten/kota i

Q_{jki} = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j kabupaten/kota i

V_{jki} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j kabupaten/kota i

J = daerah (perkotaan atau perdesaan)

i = kabupaten/kota ke- i

Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga.

$$\overline{HK}_{ji} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jki}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jki}}$$

K_{jki} = kalori dari komoditi k di daerah j kabupaten/kota i

\overline{HK}_{ji} = harga rata-rata kalori di daerah j kabupaten/kota i

$$GKM_{ji} = \overline{HK}_{ji} \times 2100$$

- GKM = kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari
 j = daerah (perkotaan/perdesaan)
 i = kabupaten/kota i

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$GKNM_{ji} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kji}$$

- $GKNM_{ji}$ = pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j kabupaten/kota i
 V_{kji} = nilai pengeluaran per komoditi/ sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) i dan daerah j (kota+desa)
 r_{kj} = rasio pengeluaran komoditi/ sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa)
 k = jenis komoditi non-makanan terpilih
 j = daerah (perkotaan atau perdesaan)
 i = kabupaten/kota (perkotaan atau perdesaan)

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_i = \frac{PM_i}{P_i} \times 100\%$$

- $\%PM_i$ = persentase penduduk miskin di kabupaten/kota i
 PM_i = jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota i
 P_i = jumlah penduduk di kabupaten/kota i

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau

$$PM_p = \sum_{p=1}^n PM_i$$

PM_p = penduduk miskin provinsi
 PM_i = penduduk miskin kabupaten/kota i
 n = jumlah kabupaten/kota

Persentase penduduk miskin di provinsi dihitung dengan

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

$\%PM_p$ = persentase penduduk miskin di provinsi
 PM_p = jumlah penduduk miskin di provinsi
 P_p = jumlah penduduk di provinsi

2.5 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *head count index* ($HCI-P_0$), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
- Kedua, indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:
-

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

- α = 0, 1, 2
 z = garis kemiskinan
 y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$
 q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
 n = jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *head count index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*- P_2).

3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya telah dimulai sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesisnya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut.

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A: jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X

N: jumlah penduduk total dan b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan yang bersumber dari data Susenas. Analisis distribusi pendapatan dapat diketahui dengan empat ukuran yaitu koefisien Gini (*Gini ratio*), ukuran bank dunia, indeks Theil dan indeks-L.

3.1 Koefisien Gini (*Gini ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumusan koefisien Gini adalah sebagai berikut.

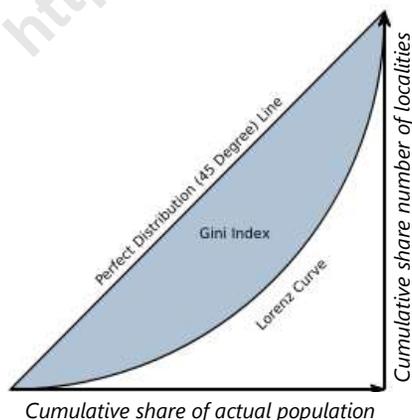
$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1}) (Y_k + Y_{k-1})$$

G = koefisien Gini (*Gini ratio*)

X_k = proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$

Y_k = proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $Y_0 = 0$ dan $Y = 1$

Nilai indeks Gini berada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.



Gambar 1. Koefisien Gini menurut kurva Lorenz

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antarkelompok, yaitu nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).
- Dapat diuji secara statistik
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antarwaktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

3.2 Ukuran Bank Dunia

Indikator lain untuk melihat distribusi penduduk adalah kriteria bank dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut.

- Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), apabila porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen.
- Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), apabila porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di antara 12 persen sampai dengan 17 persen.
- Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), apabila porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

3.3 Indeks Theil dan indeks-L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). **Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan "generalized entropy"** Rumus "generalized entropy" secara umum dapat ditulis sebagai berikut.

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\bar{y}} - 1 \right]$$

\bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. **Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.**

- $GE(1)$ disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut.

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

- $GE(0)$, juga dikenal dengan indeks-L, disebut deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

<https://ntt.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111,
Telp (0380) 826289, 821755, Faks
(0380) 833124, Mailbox :

ISSN 2528-2271



9 772528 227009 >